



RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2023



DINAS
KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL 3

KATA PENGANTAR..... 4

BAB I 5

PENDAHULUAN 5

1.1. LATAR BELAKANG 5

1.2. LANDASAN HUKUM..... 5

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 6

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 7

BAB II..... 9

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 9

2.2. ANALIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 16

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT
DAERAH..... 18

a. Analisis Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan..... 18

b. Analisis Lingkungan Internal 18

c. Analisis Lingkungan Eksternal 19

2.4. PENDAPATAN DINAS KETENAGAKERJAAN..... 20

2.5. RANCANGAN AWAL RKPD..... 22

BAB III..... 52

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETENAGAKERJAAN 52

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 52

BAB IV..... 56

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETENAGAKERJAAN 56

BAB V 88

PENUTUP 89

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Evaluasi dan Realisasi, September 2023 9

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan..... 17

Tabel 3 Target dan Realisasi IMTA..... 21

Tabel 4 Proyeksi Target IMTA 2023-2024 21

Tabel 5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 23

Tabel 6 Tujuan dan Sasaran 2023-2026..... 54

Tabel 7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023 54

Tabel 8 Tabel Kebutuhan Anggaran 2023-2026..... 56

Tabel 9 Rencana Perubahan Kerja 2023..... 58



KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Tahun 2023 s/d 2026.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator output dan indikator outcomes yang akan dicapai.

Dalam penyusunan Renja Perubahan ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan Renja Dinas menuju Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi yang responsive dan aspiratif.

Bekasi, 2023

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BEKASI**

Drs. H. EDI ROCHYADI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196409061986031012

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan Tata Cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan baik dalam Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan Masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menuangkan langkah-langkah dan kebijakan yang responsive terhadap perubahan yang terjadi baik yang berhubungan dengan kompleksitas lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Selain itu Renja Perangkat Daerah merupakan Dokumen yang mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan salah satu dokumen yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan.

Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi untuk mempersiapkan diri agar eksis dan berhasil dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan senantiasa mengupayakan perubahan-perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus di susun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau manfaat.

1.2. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- b. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6)
- h. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 84);
- i. Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor : 050/SE-96/Bappeda tanggal 30 Desember 2021 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
- j. Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor :PR.03/SE-15/Bappeda tanggal 2 Februari 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dinas Ketenagakerjaan merupakan Perangkat Daerah (PD) dan berkewajiban untuk membuat Renja PD untuk Periode 1 Tahun (2023) yang merupakan tahun ke-13, dan memuat tentang Tujuan, Strategi, Kebijakan, dan Program serta Kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi serta berpedoman kepada RPD dan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023-2026.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dan semakin berubah dengan akselerasi yang tinggi dan kompleks sebagai akibat adanya globalisasi seperti dewasa ini, maka Dinas Ketenagakerjaan

Kabupaten Bekasi secara kontinyu melakukan perubahan – perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan, konsistensi, dan berkelanjutan, sehingga dapat optimal dalam melakukan kinerja yang berorientasi kepada Pembangunan Masyarakat Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi yang berwawasan lingkungan dan tentunya tidak terlepas dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi.

Agar tugas pokok dan fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis yang secara hirarkis akan menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Perencanaan kerja sangat penting bagi upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan karena hal yang akan diungkapkan dalam Rencana Kerja (Renja) pada dasarnya adalah apakah indikator sasaran (outcomes) pada setiap kegiatan akan dapat mendukung pencapaian sasaran atau apakah outcomes sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Apabila sudah sesuai maka langkah selanjutnya adalah penetapan besarnya target sasaran dan anggaran yang diperlukan pada tahun berjalan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan review

terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETENAGAKERJAAN

Bab ini memuat uraian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, dan perumusan tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta penjelasan mengenai program dan kegiatan Tahun Rencana (Tahun 2023).

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETENAGAKERJAAN

Pada bagian ini dikemukakan Rencana Kerja Perubahan berupa rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB V. PENUTUP

Dalam Bab ini berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Dalam rencana jangka waktu 4 tahun yaitu tahun 2023-2026, dan pada tahun pertama (2023), telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan berdasarkan program-program strategis untuk mencapai program dalam pembangunan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun sasaran strategis serta program yang dilaksanakan pada tahun 2022 (n-1) dan tahun 2022 yaitu sebagaimana berikut :

Tabel 1 Evaluasi dan Realisasi, September 2023

KODE	URAIAN	LOKASI	PAGU DANA (Rp.)	REAL. KEUANGAN		TARGET FISIK	REAL. FISIK		Keterangan
				(Rp.)	(%)		K	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		29.628.362.000,00	12.361.482.863,00	41,72	0,00	0,00	46,19	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		18.656.614.500,00	8.604.449.723,00	46,12	0,00	0,00	0,00	
	- Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah		0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		449.152.000,00	176.111.840,00	39,21	0,00	0,00	89,36	
	- Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan ketentuan		0,00	0,00	0,00	19,00	9,00	47,37	
2.07.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		20.000.000,00	16.720.000,00	83,60	0,00	0,00	100,00	
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	100,00	
2.07.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		13.721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

	- <i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	
2.07.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - <i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>		10.067.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00	
2.07.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - <i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>		13.722.600,00 0,00	13.351.600,00 0,00	97,30 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00	
2.07.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - <i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>		9.521.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00	0,00 1,00	100,00 100,00	
2.07.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		131.850.000,00 0,00	86.267.040,00 0,00	65,43 0,00	0,00 5,00	0,00 4,00	80,00 80,00	
2.07.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		250.270.400,00 0,00	59.773.200,00 0,00	23,88 0,00	0,00 8,00	0,00 7,00	87,50 87,50	
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - <i>Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah</i>		15.031.192.000,00 0,00	7.241.093.822,00 0,00	48,17 0,00	0,00 5,00	0,00 4,00	32,50 80,00	
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		14.831.192.000,00 0,00	7.144.037.622,00 0,00	48,17 0,00	0,00 57,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan</i>		50.000.000,00 0,00	46.463.000,00 0,00	92,93 0,00	0,00 2,00	0,00 1,00	50,00 50,00	

	<i>Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>								
2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD - <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>		150.000.00 0,00	50.593.200,00	33,73	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah - <i>Tersedianya layanan administrasi umum Perangkat Daerah selama 12 Bulan</i>		1.905.755.900,00	951.879.661,00	49,95	0,00	0,00	42,00	
			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		194.985.800,00	93.305.800,00	47,85	0,00	0,00	60,00	
			0,00	0,00	0,00	5,00	3,00	60,00	
2.07.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor - <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>		275.700.000,00	108.020.000,00	39,18	0,00	0,00	50,00	
			0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	50,00	
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>		72.876.000,00	72.876.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
			0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		1.189.000.000,00	562.177.861,00	47,28	0,00	0,00	42,00	
			0,00	0,00	0,00	100,00	42,00	42,00	
2.07.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>		173.194.100,00	115.500.000,00	66,69	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - <i>Jumlah barang milik daerah yang diadakan dalam satu tahun</i>		166.412.000,00	1.190.000,00	0,72	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>		166.412.000,00	1.190.000,00	0,72	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - <i>Cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang terpenuhi</i>		596.102.600,00	153.274.400,00	25,71	0,00	0,00	12,50	
			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		596.102.600,00	153.274.400,00	25,71	0,00	0,00	25,00	

	- <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>		0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	25,00	
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - <i>Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dalam setahun</i>		508.000.000,00 0,00	80.900.000,00 0,00	15,93 0,00	0,00 91,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>		243.000.000,00 0,00	49.000.000,00 0,00	20,16 0,00	0,00 20,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>		65.000.000,00 0,00	31.900.000,00 0,00	49,08 0,00	0,00 70,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>		200.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - <i>Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan sertifikasi kompetensi dan pelatihan</i> - <i>Persentase Perusahaan kecil yang ditingkatkan produktivitasnya</i> - <i>Jumlah lembaga pelatihan kerja yang terakreditasi</i>		4.285.888.500,00 0,00 0,00 0,00	1.569.976.440,00 0,00 0,00 0,00	36,63 0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 50,00 5,00	0,00 47,00 0,00 2,00	29,00 47,00 0,00 40,00	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - <i>Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan</i>		2.235.888.500,00 0,00	1.005.667.540,00 0,00	44,98 0,00	0,00 418,00	0,00 140,00	40,42 33,49	
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi - <i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>		2.235.888.500,00 0,00	1.005.667.540,00 0,00	44,98 0,00	0,00 528,00	0,00 250,00	47,35 47,35	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		750.000.000,00	286.672.800,00	38,22	0,00	0,00	25,00	

	- Jumlah LPK yang dibina		0,00	0,00	0,00	160,00	40,00	25,00	
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		750.000.000,00	286.672.800,00	38,22	0,00	0,00	25,00	
	- Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		0,00	0,00	0,00	160,00	40,00	25,00	
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		700.000.000,00	215.321.300,00	30,76	0,00	0,00	59,09	
	- jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi produktivitas		0,00	0,00	0,00	110,00	30,00	27,27	
2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		700.000.000,00	215.321.300,00	30,76	0,00	0,00	90,91	
	- Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas		0,00	0,00	0,00	110,00	100,00	90,91	
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		600.000.000,00	62.314.800,00	10,39	0,00	0,00	50,00	
	- Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja		600.000.000,00	62.314.800,00	10,39	0,00	0,00	100,00	
	- Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		3.070.000.000,00	1.120.001.900,00	36,48	0,00	0,00	0,00	
	- Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelayanan antar kerja		0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
	- Jumlah tenaga kerja mandiri		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		795.000.000,00	402.712.400,00	50,66	0,00	0,00	74,87	
	- Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL		0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.461,00	49,74	
2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja		625.000.000,00	294.832.400,00	47,17	0,00	0,00	49,74	
	- Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.461,00	49,74	
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	- Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD		0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	100,00	
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja		110.000.000,00	107.880.000,00	98,07	0,00	0,00	100,00	
	- Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	100,00	
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		900.000.000,00	307.454.000,00	34,16	0,00	0,00	62,39	

	- Jumlah laporan data pencari kerja terdaftar dan lowongan pekerjaan		0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100,00	
2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		400.000.000,00	74.784.800,00	18,70	0,00	0,00	0,00	
	- Jumlah data dan informasi yang dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online		500.000.000,00	232.669.200,00	46,53	0,00	0,00	87,18	
	- Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui sistem online (Karirhub)		0,00	0,00	0,00	195,00	170,00	87,18	
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		625.000.000,00	148.469.500,00	23,76	0,00	0,00	66,67	
	- Jumlah pekerja migran indonesia (PMI) purna penempatan yang diberdayakan		0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	100,00	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		425.000.000,00	148.469.500,00	34,93	0,00	0,00	100,00	
	- Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya		0,00	0,00	0,00	410,00	410,00	100,00	
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan		200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan		0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		750.000.000,00	261.366.000,00	34,85	0,00	0,00	50,00	
	- Jumlah realisasi retribusi pengguna tenaga kerja asing/IMTA		0,00	0,00	0,00	32.000.000.000,00	0,00	0,00	
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		750.000.000,00	261.366.000,00	34,85	0,00	0,00	100,00	
	- Jumlah Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing yang di Koordinasikan		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	100,00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		3.615.859.000,00	1.067.054.800,00	29,51	0,00	0,00	0,00	
	- Persentase Perusahaan yang memiliki syarat kerja		0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		20.540.800,00	17.011.000,00	82,82	0,00	0,00	38,94	
	- jumlah perusahaan yang terlayani untuk pengesahan PP dan pendaftaran PKB		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	

2.07.05.2. 01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan - <i>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online</i>		10.270.400,00 0,00	7.670.000,00 0,00	74,68 0,00	0,00 200,00	0,00 57,00	28,50 28,50	
2.07.05.2. 01.02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan - <i>Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama</i>		10.270.400,00 0,00	9.341.000,00 0,00	90,95 0,00	0,00 300,00	0,00 265,00	88,33 88,33	
2.07.05.2. 02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - <i>jumlah koordinasi dengan 3 unsur dalam lembaga kerjasama tripartit (LKS Tripartit)</i> - <i>Jumlah Perusahaan yang mengikuti kepersertaan jamsostek</i>		3.595.318.200,00 0,00 0,00	1.050.043.800,00 0,00 0,00	29,21 0,00 0,00	0,00 100,00 200,00	0,00 68,00 200,00	67,08 68,00 100,00	
2.07.05.2. 02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - <i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>		774.983.000,00 0,00	194.990.000,00 0,00	25,16 0,00	0,00 385,00	0,00 243,00	63,12 63,12	
2.07.05.2. 02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - <i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>		1.200.673.600,00 0,00	289.804.800,00 0,00	24,14 0,00	0,00 200,00	0,00 76,00	38,00 38,00	
2.07.05.2. 02.03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi - <i>Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi</i>		150.000.000,00 0,00	9.921.600,00 0,00	6,61 0,00	0,00 3,00	0,00 2,00	66,67 66,67	
2.07.05.2. 02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota - <i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>		1.469.661.600,00 0,00	555.327.400,00 0,00	37,79 0,00	0,00 3,00	0,00 2,00	66,67 66,67	

3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI - <i>Persentase Perjanjian Kerja sama di bidang transmigrasi</i> Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - <i>jumlah masyarakat yang mengikuti program transmigrasi</i> Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - <i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i> Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - <i>Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan</i> Penyuluhan Transmigrasi - <i>Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan</i> Pelatihan Transmigrasi - <i>Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan</i>		725.000.00 0,00	153.018.40 0,00	21,1 1	0,00	0,00	9,52	
3.32.03			725.000.00 0,00	153.018.40 0,00	21,1 1	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
3.32.03.2.01			725.000.00 0,00	153.018.40 0,00	21,1 1	0,00	0,00	11,4 3	
			0,00	0,00	0,00	350,00	100,0 0	28,5 7	
3.32.03.2.01.01			425.000.00 0,00	109.084.40 0,00	25,6 7	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
3.32.03.2.01.04			100.000.00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	
3.32.03.2.01.05			150.000.00 0,00	43.934.000, 00	29,2 9	0,00	0,00	28,5 7	
			0,00	0,00	0,00	350,00	100,0 0	28,5 7	
3.32.03.2.01.06			50.000.000, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
JUMLAH			30.353.362. 000,00	12.514.501. 263,00	41,2 3			27,8 6	

2.2. ANALIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bukan hanya untuk menciptakan kesempatan kerja, tetapi juga untuk mengakomodasi kelangsungan bekerja, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja/buruh, serta kelangsungan usaha yang berkesinambungan Sejumlah tantangan dan peluang ketenagakerjaan yang ada saat ini,

antara lain, pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, angka pengangguran yang masih tinggi, perlunya pembangunan SDM yang berkualitas, dan perkembangan ekonomi digital dan tren teknologi yang mengubah lanskap bisnis ke depan, sehingga mempengaruhi peta kebutuhan tenaga kerja dan perubahan pola hubungan kerja yang semakin dinamis UU Cipta Kerja juga bertujuan menyelesaikan tantangan ketenagakerjaan lainnya, seperti bonus demografi, di mana sebagian besar penduduknya berusia produktif atau usia kerja, dan dampak Covid-19 terhadap ketenagakerjaan

Jumlah perusahaan di wilayah Kabupaten Bekasi yang banyak menjadikan peluang di sektor tenaga kerja dan pendapatan daerah dari retribusi penggunaan tenaga kerja asing sehingga mampu meningkatkan pelayanan ketenagakerjaan yang lebih baik untuk para tenaga kerja.

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Angka tingkat pengangguran terbuka	N/A	Angka tingkat pengangguran terbuka	9,53	9,03	8,53	8,03	7,53	10.97	9.69	9.00	11.54	10.09
2	Presentase lembaga kete-nagakerjaan yang terakre-ditasi	N/A	Presentase lembaga kete-nagakerjaan yang terakre-ditasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Angka tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	N/A	Angka tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	63,87	64,57	65,27	65,97	66,67	61.26	61.46	67.33	64.23	N/A
4	Jumlah kaum difabel yang mendapatkan pekerjaan	N/A	Jumlah kaum difabel yang mendapatkan pekerjaan	45 orang	45 orang	45 orang	45 orang	45 orang	45 orang	45 orang	45 orang	45 orang	45 orang

5	Jumlah perselisihan di perusahaan	N/A	Jumlah perselisihan di perusahaan	350	400	450	500	550	234	225	286	230	N/A
6	Rekomendasi kepala daerah ttg UMK	N/A	Rekomendasi kepala daerah ttg UMK	1 rek	1 rek	1 rek	1 rek	1 rek	1 rek	1 rek	1 rek	1 rek	1 rek

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan yang ada serta mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan maka dapat dirumuskan isu strategis, sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pembekalan kepada pencari kerja
2. Perlu diberikan pengetahuan tentang kewirausahaan
3. Perlu ditingkatkan penanganan kasus ketenagakerjaan secara terkoordinir dan berkesinambungan.
4. Perlu penambahan pengawasan ketenagakerjaan yang seimbang dengan jumlah objek pengawasan.
5. Perlu diadakan koordinasi yang efektif antara pengawasan ketenagakerjaan dengan mediator, organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta pihak keamanan.
6. Perlu peran optimalisasi Forum Pengurangan Pengangguran.
7. Perlu diadakan bursa kerja online sebagai media informasi lowongan kerja.
8. Perlu adanya sosialisasi hubungan industrial yang harmonis.
9. Perlu Pemagangan dalam negeri dan luar negeri.
10. Perlu Optimalisasi Pengembangan UPTD Balai Latihan Kerja.
11. Perlu penambahan jumlah SDM Mediator agar seimbang dengan jumlah kasus.
12. Perlu inovasi pelayanan berbasis online untuk mempermudah layanan ketenagakerjaan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi

a. Analisis Lingkungan Dinas Ketenagakerjaan

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk membantu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketenagakerjaan.

b. Analisis Lingkungan Internal

Perkembangan teknologi informasi, dinamika sosial, politik dan ekonomi

telah membawa perubahan yang sangat luas dan mendasar terhadap kehidupan kemasyarakatan sehari-hari. Perubahan lingkungan organisasi ini harus direspon secara bijaksana. Dalam tataran pemerintahan, perubahan kelembagaan adalah hal yang tidak dapat dihindari, terjadi penataan isu-isu strategis, pengelompokan ulang pekerjaan, demikian juga dengan kewenangan yang melekat pada institusi tersebut. Dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan, sejak era reformasi telah mengalami beberapa kali perubahan kelembagaan.

Sejak Otonomi Daerah diberlakukan, kelembagaan Dinas Ketenagakerjaan tidak banyak mengalami perubahan, namun hanya mengalami penyesuaian sejalan dengan perubahan aturan perundangan. Perubahan terjadi dalam lingkup pekerjaan yang semakin luas dan bertambahnya kewenangan baru sejalan dengan dinamika permasalahan yang dihadapi dalam bidang ketenagakerjaan. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi Dinas Ketenagakerjaan ini menuntut kapasitas aparat untuk mengatasinya. Dengan kondisi SDM saat ini maka kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur mutlak diperlukan.

Uraian di atas merupakan kekuatan dan institusi Dinas Tenaga Kerja, sedangkan pada sisi yang lain, Dinas Ketenagakerjaan perlu adanya penambahan aparatur yang berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tercipta ketidakseimbangan antara beban kerja (sesuai tupoksi dan kewenangan), dengan potensi sumber daya aparatur yang ada.

Hal-hal tersebut tentunya juga berkaitan dengan karakteristik wilayah dan penduduk Kabupaten Bekasi. Di lihat dan letak geografis, Kabupaten Bekasi pada sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa; sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, sebelah Barat berbatasan dengan Kota Jakarta Utara dan Kota Bekasi, sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor. Dengan luas wilayah sebesar ± 127.388 Ha, yang terbagi dalam 23 kecamatan, dan terdiri dari 8 kelurahan dan 179 desa, serta jumlah penduduk 3.256.000 jiwa. Ditambah lagi dengan karakteristik penduduk Kabupaten Bekasi yang sangat heterogen. Kedua aspek tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi institusi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, dengan segala kemampuan yang ada.

c. Analisis Lingkungan Eksternal

Perubahan di bidang sosial, politik dan ekonomi serta era keterbukaan (globalisasi) ditandai dengan semakin tingginya minat dan perhatian masyarakat untuk mendirikan usaha dan berinvestasi. Selain itu juga gencarnya pemerintah untuk menarik investor berinvestasi ke Indonesia merupakan peluang yang dapat

dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk terlibat. Pemerintah daerah dapat berperan untuk memberi pelayanan pada investor untuk sebesar-besarnya dimanfaatkan sebagai trigger pembangunan ekonomi daerah, sedang masyarakat dapat memanfaatkan untuk ikut terlibat dalam proses produksi. Peran Dinas Ketenagakerjaan amat penting, baik sebagai regulator maupun sebagai mediator antara investor dengan masyarakat.

Seiring dengan dinamika itu, pada tingkat aktualisasinya masih terdapat beberapa hal yang merupakan permasalahan dan membutuhkan penanganan secara sungguh-sungguh. Terdapat kecenderungan potensi yang dapat berdampak pada dinamika permasalahan tenaga kerja, antara lain:

1. Menguatnya kesadaran hak para pekerja (tenaga kerja) yang bermuara pada timbulnya aksi demo dan mogok massal.
2. Kesenjangan antara penyerapan Ketenagakerjaan dari luar daerah dan luar negeri dapat menimbulkan keresahan yang dapat menciptakan ketidakstabilan iklim berusaha di Kabupaten Bekasi
3. Terdapat kecenderungan bergesernya nilai-nilai budaya yang bersifat kekeluargaan /gotong royong, menjadi bersifat individualis bahkan mengarah kepada sifat anarkis. Hal tersebut juga memiliki peluang berdampak pada melemahnya rasa menghargai terhadap nilai-nilai kebangsaan.
4. Kecepatan perubahan teknologi seringkali tidak diimbangi kecepatan Ketenagakerjaan menyesuaikan dengan perubahan tersebut, apabila hal ini tidak diantisipasi akan semakin memperlemah daya saing Ketenagakerjaan lokal.

Banyaknya perusahaan dan pabrik di Kabupaten Bekasi, dimana dalam operasionalnya mempekerjakan warga asing, namun disebabkan keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur, kalangan asing tersebut tidak optimal dalam memperoleh pengawasan.

2.4. PENDAPATAN DINAS KETENAGAKERJAAN

Disisi lain berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi dan Peraturan Bupati Bekasi Nomor : 22 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penerbitan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi, Dinas Ketenagakerjaan merupakan dinas yang mampu menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi perpanjangan kerja tenaga asing dengan realisasi

pertahun sebagai berikut :

Tabel 3 Target dan Realisasi IMTA

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentasi Jumlah Realisasi Pencapaian IMTA
1	2017	37.000.000.000	34.754.760.950	93.93
2	2018	34.000.000.000	34.108.854.105	100.32
3	2019	39.000.000.000	32.761.532.225	84.00
4	2020	32.347.500.000	36.514.323.225	112.88
5	2021	32.000.000.000	24.317.900.900	75.99
6	2022	5.000.000.000	0	N/A
7	2023	32.000.000.000	2.000.000.000	18.234.000.000

Sumber : Data Bidang Penempatan

Tahun 2022 lagi kenapa realisasi nya 0 (Nol) Karena Perubahan Peraturan Daerah 2022 belum disahkan.

Tabel 4 Proyeksi Target IMTA 2023-2024

No.	Tahun	Target	Ket.
1	2023	32.000.000.000	
2	2024	33.000.000.000	
3	2025	34.000.000.000	
4	2026	34.000.000.000	

Bedasarkan data diatas dan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bekasi BAB VII Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Pasal 9 ayat 1 menyebutkan Penggunaan retribusi dimanfaatkan untuk pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja dan peningkatan sumber daya manusia lainnya dan program kegiatan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan Pasal BAB XVIII Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pasal 27 ayat 1 Dinas tenaga kerja yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah diberikan insentif, ayat 2 Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD Kabupaten Bekasi dan ayat 3 Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Sehingga diharapkan dana Retribusi Imta yang dihasilkan sesuai dengan pencapaian dana Retribusi IMTA diberikan kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk membiayai program program untuk pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja dan peningkatan sumber daya manusia lainnya dan program kegiatan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dengan pagu anggaran Dinas Ketenagakerjaan yang seimbang bahkan lebih setiap tahun anggaran dan Peraturan Daerah tersebut diatas saat ini ada perubahan dan sedang di evaluasi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

perbulan Juni 2022 ini, namun hanya beberapa pasal yang berubah mengikuti peraturan diatasnya.

2.5. RANCANGAN AWAL RKPD

Sesuai dengan rancangan awal dan prioritas pembangunan daerah pada RPD Permintah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 disebutkan bahwa terdapat 2 (Dua) Tujuan dan Sasaran Daerah :

- 1. Terwujudnya peningkatan perekonomian daerah.
- 2. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya kemiskinan.

Lalu diturunkan kedalam prioritas pembangunan daerah tahun 2024 yaitu :

- 1. Peningkatan Kapasitas Pencari Kerja dan Program Pemagangan.
- 2. Pelaksanaan Padat Karya
- 3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (BLK)

Dengan sasaran Dinas Ketenagakerjaan Meningkatnya daya saing dan kesempatan kerja dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbukanya, dengan rancangan awal RKPD dibawah ini.

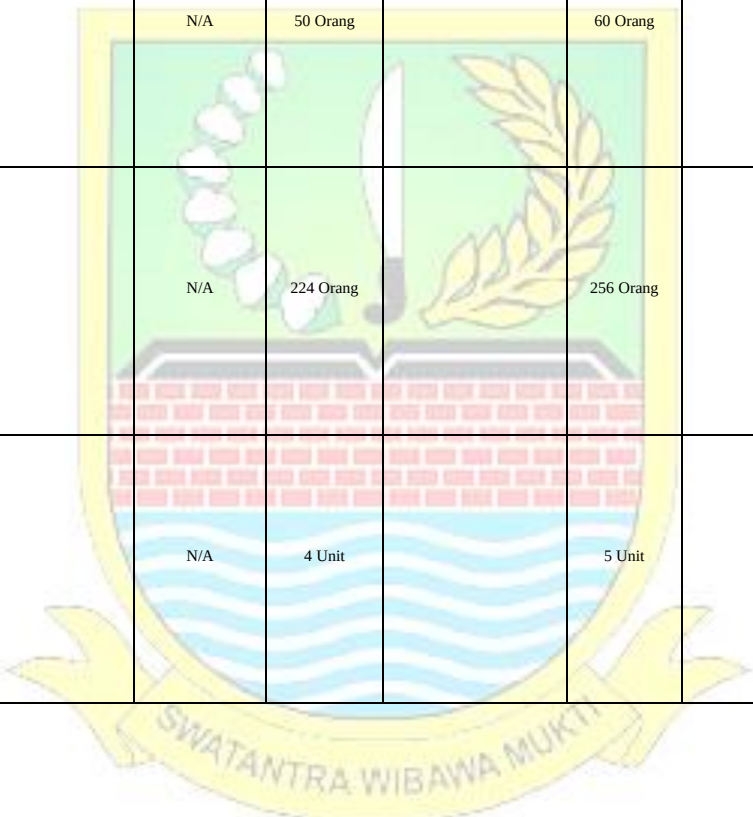


Tabel 5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

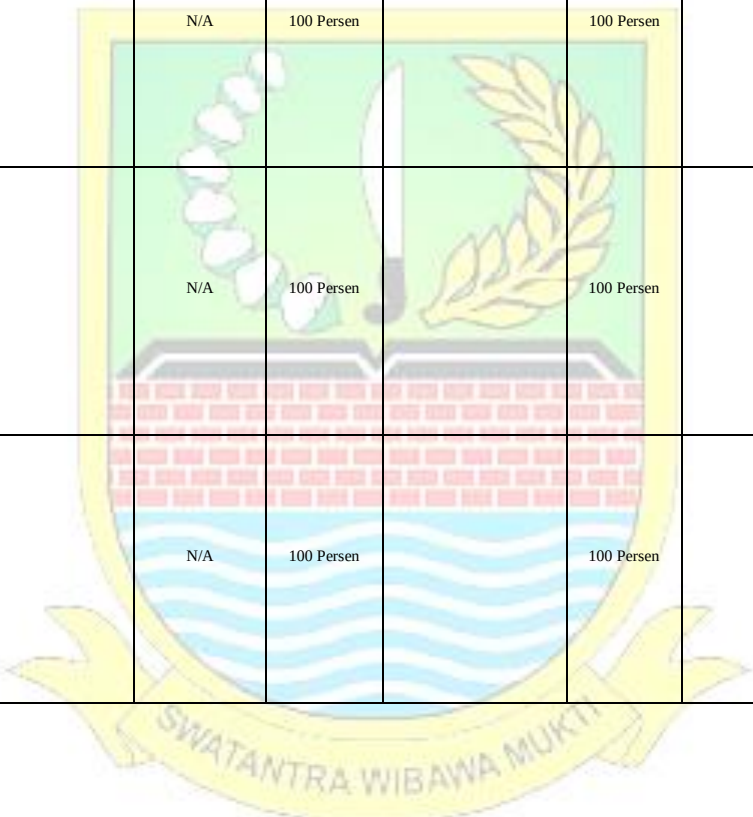
Tujuan	Sasaran	Kode Program, Kode Kegiatan dan Kode Subkegiatan	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program	Indikator Keluaran dan Hasil Kegiatan	Indikator Subkegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan							
								2023		2024		2025		2026	
								Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Meningkatkan daya saing dan kesempatan kerja				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			10,09	9,40 Persen		9,02 Persen		8,64 Persen		8,26 Persen	
	Peningkatan Daya saing tenaga kerja dan iklim ketenagakerjaan			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			N/A	66,00 Persen		66,10 Persen		66,20 Persen		66,30 Persen	

		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan			N/A	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen	
				Persentase pelatihan angkatan kerja berbasis kompetensi			N/A	10 Persen	20 Persen		30 Persen		40 Persen	
				Persentase Perusahaan kecil yang ditingkatkan produktivitasnya			N/A	50 Persen	60 Persen		70 Persen		80 Persen	
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi (Dinas)		N/A	50 Orang	60 Orang		70 Orang		80 Orang	

					Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan (Dinas)		N/A	50 Orang	60 Orang		70 Orang		80 Orang	
					Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan (UPTD BLK)		N/A	224 Orang	256 Orang		288 Orang		320 Orang	
					Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana pelatihan Balai Latihan Kerja (UPTD BLK)		N/A	4 Unit	5 Unit		6 Unit		6 Unit	



					Hasil : Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi (Dinas)		N/A	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen	
					Hasil : Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan; (Dinas)		N/A	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen	
					Hasil : Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan; (UPTD BLK)		N/A	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen	



					persentase sarana dan prasarana pelatihan Balai Latihan Kerja yang terpenuhi (UPTD BLK)		N/A	70 Persen	80 Persen		90 Persen		100 Persen		
		2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	N/A	300 Orang	1,000,000,000	370 Orang	1,500,000,000	460 Orang	1,770,000,000	530 Orang	1,770,000,000
		2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (UPTD Balai Latihan Kerja)			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	N/A	144 Orang	2,136,000,000	350 Orang	2,000,000,000	400 Orang	2,160,000,000	450 Orang	2,170,000,000
		2.07.03.2.01.03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	N/A	16 Unit	245,690,000	3 Unit	245,690,000	3 Unit	260,000,000	3 Unit	270,000,000

		2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Keluaran : Jumlah LPK yang dibina		N/A	50 LPK	60 LPK		70 LPK		80 LPK		
					Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang dimagangkan		N/A	20 Orang	25 Orang		30 Orang		35 Orang		
					Hasil : Persentase LPK Terakreditasi		N/A	1 Persen	1 Persen		1 Persen		1 Persen		
		2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		N/A	50 Lembaga	1,500,000,000	60 Lembaga	750,000,000	70 Lembaga	770,000,000	80 Lembaga	780,000,000
		2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		Keluaran : Jumlah Penerbitan Izin yang terintegrasi		N/A				1 Perijinan		1 Perijinan		

					Hasil : Persentase Jumlah Perijinan yang terintegrasi		N/A					10 Persen		10 Persen	
		2.07.03.2.03.0 1	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	N/A					2 Perijinan	200,000,000	2 Perijinan	250,000,000
		2.07.03.2.04	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		Keluran : Jumlah Perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi produktivitas		N/A	50 Perusahaan	100 Perusahaan			150 Perusahaan		200 Perusahaan	
					Hasil : Persentase Perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi produktivitas		N/A	10 Persen	20 Persen			30 Persen		40 Persen	
		2.07.03.2.04.0 1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	N/A	150 Perusahaan	700,000,000	200 Perusahaan	700,000,000	250 Perusahaan	720,000,000	300 Perusahaan	730,000,000

		2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Keluaran : jumlah tenaga kerja yang diukur produktivitasnya .		N/A	100 Tenaga Kerja		120 Tenaga kerja		140 Tenaga kerja		160 Tenaga kerja	
					Hasil : Persentase hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja		N/A	5 Persen		10 Persen		15 Persen		20 Persen	
		2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	N/A	100 Dokumen	600,000,000	150 Dokumen	600,000,000	200 Dokumen	620,000,000	250 Dokumen	630,000,000
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan pencari kerja terdaftar			N/A	40 Persen		40 Persen		40 Persen		40 Persen	
				Persentase Tenaga Kerja yang terserap melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja			N/A	5 Persen		5 Persen		5 Persen		5 Persen	
				Persentase lowongan kerja yang terinformasikan			N/A	50 Lowongan		55 Lowongan		60 Lowongan		65 Lowongan	

		2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		Keluaran : Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pelayanan Antar Kerja		N/A	15000 Orang		15500 Orang		16000 Orang		16500 Orang	
					Hasil : Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelayanan Antar Kerja		N/A	60 Persen		70 Persen		80 Persen		90Persen	
					Keluaran : Jumlah Tenaga Kerja Mandiri		N/A	100 Orang		350 Orang		400 Orang		450 Orang	
					Keluaran : Jumlah Pencari Kerja Disabilitas yang mendapatkan pelayanan antar kerja		N/A	2 Orang		3 Orang		4 Orang		5 Orang	
					Hasil : Persentase Hasil Program Kesempatan Kerja		N/A	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	
		2.07.04.2.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja		Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi		N/A			240 Orang	50,000,000	300 Orang	120,000,000	360 Orang	150,000,000

		2.07.04.2.01.0 2	Pelayanan antar Kerja			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	N/A	15000 Orang	425,000,000	155000 Orang	425,000,000	16000 Orang	440,000,000	16500 Orang	450,000,000
		2.07.04.2.01.0 3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	N/A			300 Orang	100,000,000	360 Orang	125,000,000	420 Orang	130,000,000
		2.07.04.2.01.0 4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	N/A	50 Orang	60,000,000	50 Orang	70,000,000	50 Orang	80,000,000	50 Orang	90,000,000
		2.07.04.2.01.0 5	Perluasan Kesempatan Kerja			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	N/A	100 Orang	110,000,000	350 Orang	105,000,000	400 Orang	130,000,000	450 Orang	140,000,000
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		Keluaran : Jumlah Laporan Data Pencari kerja terdaftar dan Lowongan Pekerjaan		N/A	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	

					Hasil : Jumlah Data IPK yang terpublish		N/A	50 Lowongan	55 Lowongan		60 Lowongan		65 Lowongan		
		2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	N/A	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	400,000,000	1 Dokumen	430,000,000	1 Dokumen	440,000,000
		2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	N/A	80 Orang	300,000,000	80 Orang	300,000,000	80 Orang	330,000,000	80 Orang	340,000,000
		2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	N/A				300 Orang	200,000,000	350 Orang	250,000,000	

		2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		Keluaran : Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Penempatan yang Diberdayakan		N/A	40 Orang	50 Orang		60 Orang		70 Orang	
					Keluaran : Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mendapatkan Perlindungan		N/A	130 Orang	150 Orang		180 Orang		200 Orang	
					Keluaran : Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mendapatkan Perlindungan		N/A	50 Orang	50 Orang		60 Orang		60 Orang	
					Keluaran : Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mendapatkan Perlindungan		N/A	100 Orang	100 Orang		150 Orang		150 Orang	

					Hasil : Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan		N/A	10 Orang		11 Orang		12 Orang		13 Orang	
		2.07.04.2.04.0 1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	N/A	180 Orang	425,000,000	200 Orang	425,000,000	240 Orang	460,000,000	260 Orang	470,000,000
		2.07.04.2.04.0 3	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	N/A	40 Orang	200,000,000	50 Orang	200,000,000	60 Orang	240,000,000	70 Orang	260,000,000
		2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Keluaran : Jumlah Realisasi Retribusi Pengguna Tenaga Kerja Asing/IMTA;		N/A	32.000.000.0 00,- Rupiah		32.000.000.0 00,- Rupiah		34.000.000.0 00,- Rupiah		34.000.000.000 ,- Rupiah	
					Hasil : Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Pengguna Tenaga Kerja Asing/IMTA		N/A	75 Persen		80 Persen		85 Persen		90 Persen	

		2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing yang di Koordinasikan	N/A	300 Perusahaan	500,000,000	320 Perusahaan	500,000,000	350 Perusahaan	540,000,000	300 Perusahaan	560,000,000
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Perjanjian Kerja sama di bidang transmigrasi			N/A	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	0	100 Persen	0
		3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Keluaran : Jumlah Masyarakat yang mengikuti program transmigrasi		N/A	100 Masyarakat		200 Masyarakat		300 Masyarakat		400 Masyarakat	
					Hasil Jumlah Masyarakat yang mengikuti perpindahan penduduk		N/A	5 Keluarga		5 Keluarga		5 Keluarga		5 Keluarga	
		3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten	N/A	1 Laporan	375,000,000	1 Laporan	375,000,000	1 Laporan	420,000,000	1 Laporan	460,000,000

		3.32.03.2.01.04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Keluarga Transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	N/A	5 Keluarga	85,000,000	5 Keluarga	85,000,000	6 Keluarga	95,000,000	7 Keluarga	150,000,000
		3.32.03.2.01.05	Penyuluhan Transmigrasi			Jumlah Masyarakat yang mengikuti Penyuluhan ketransmigrasian	N/A	250 Masyarakat	150,000,000	260 Masyarakat	150,000,000	270 Masyarakat	170,000,000	280 Masyarakat	180,000,000
		3.32.03.2.01.06	Pelatihan Transmigrasi			Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan	N/A	10 Orang	50,000,000	10 Orang	55,000,000	10 Orang	60,000,000	10 Orang	65,000,000
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang memiliki syarat kerja			N/A	2 Persen		2 Persen		2 Persen		2 Persen	
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Keluaran : Jumlah Perusahaan yang terlayani untuk Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB		N/A	200 Perusahaan		300 Perusahaan		400 Perusahaan		500 Perusahaan	

					Keluaran : Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sosialisasi UM		N/A	100 Perusahaan		100 Perusahaan		100 Perusahaan		100 Perusahaan	
					Keluaran : Jumlah Perusahaan yang mengikuti kepesertaan Jamsostek		N/A	200 Perusahaan		300 Perusahaan		400 Perusahaan		500 Perusahaan	
					Hasil : Persentase Penyelesaian Pelayanan Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB tepat waktu		N/A	40 Persen		50 Persen		60 Persen		70 Persen	
					Hasil : Persentase Penyelesaian Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial		N/A	50 Persen		60 Persen		70 Persen		80 Persen	
		2.07.05.2.01.0 1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		N/A	200 Perusahaan	50,000,000	225 Perusahaan	50,000,000	250 Perusahaan	70,000,000	250 Perusahaan	200,000,000

		2.07.05.2.01.0 2	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	N/A	100 Perusahaan	50,000,000	125 Perusahaan	50,000,000	150 Perusahaan	70,000,000	175 Perusahaan	200,000,000
		2.07.05.2.01.0 3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	N/A					1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	250,000,000
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		Keluaran : Jumlah Koordinasi dengan 3 Unsur dalam lembaga kerjasama tripartit (LKS Tripartit)		N/A	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	
					Hasil : Persentase Penyelesaian Pelayanan Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB tepat waktu		N/A	40 Laporan		50 Persen		60 Persen		70 Persen	

					Hasil : Persentase Penyelesaian Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial		N/A	50 Persen	60 Persen		70 Persen		80 Persen		
		2.07.05.2.02.0 1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	N/A	200 Perkara	300,000,000	190 Perkara	300,000,000	180 Perkara	320,000,000	170 Perkara	330,000,000
		2.07.05.2.02.0 2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	N/A	200 Perkara	300,000,000	190 Perkara	300,000,000	180 Perkara	320,000,000	170 Perkara	330,000,000
		2.07.05.2.02.0 3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	N/A	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	150,000,000	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	160,000,000	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	170,000,000	20 Asosiasi dan Serikat Pekerja	200,000,000

		2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	N/A	3 Lembaga	1,530,000,000	3 Lembaga	1,500,000,000	3 Lembaga	1,600,000,000	3 Lembaga	1,600,000,000
		2.07.05.2.02.05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	N/A					200 Orang	100,000,000	250 Orang	200,000,000
		2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah			N/A	55 Point		57 Point		59 Point		61 Point	
		2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Keluaran : Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan		N/A	16 Dokumen		16 Dokumen		16 Dokumen		16 Dokumen	

					Hasil : Persentase keselarasan Renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah, Renja dengan Renstra, dan DPA dengan Renja		N/A	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		
		2.07.01.2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	6 Dokumen	120,000,000	6 Dokumen	130,000,000	6 Dokumen	140,000,000	6 Dokumen	150,000,000
		2.07.01.2.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	N/A	1 Dokumen	13,006,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	16,000,000	1 Dokumen	17,000,000
		2.07.01.2.01.0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	N/A	1 Dokumen	9,334,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	20,000,000
		2.07.01.2.01.0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	N/A	1 Dokumen	13,006,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	16,000,000	1 Dokumen	17,000,000

		2.07.01.2.01.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	N/A	1 Dokumen	8,806,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	20,000,000
		2.07.01.2.01.0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	5 Laporan	150,000,000	5 Laporan	150,000,000	5 Laporan	160,000,000	5 Laporan	170,000,000
		2.07.01.2.01.0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	1 Laporan	70,000,000	1 Laporan	80,000,000	1 Laporan	85,000,000	1 Laporan	90,000,000
		2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Keluaran : Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah		N/A	6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen		6 Dokumen	

					Hasil : Persentase terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan perangkat daerah		N/A	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen	
		2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	57 Orang/bulan	14,731,192,000	60 Orang/bulan	14,831,192,000	65 Orang/bulan	14,881,192,000	70 Orang/bulan	14,931,192,000
		2.07.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	120,000,000	1 Laporan	130,000,000
		2.07.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	N/A	5 Laporan	100,000,000	5 Laporan	100,000,000	5 Laporan	120,000,000	5 Laporan	130,000,000

		2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Keluaran : Tersedianya Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah		N/A			1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	
					Hasil : Persentase Pegawai yang Terpenuhi Administrasi Kepegawaian		N/A			100 Persen		100 Persen		100 Persen	
		2.07.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	N/A					1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	120,000,000
		2.07.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A			160 Orang	50,000,000	160 Orang	100,000,000	160 Orang	100,000,000
		2.07.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	N/A					135 Orang	100,000,000	135 Orang	120,000,000

		2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Keluaran : Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah selama 12 bulan		N/A	1 Jenis	1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis		
					Hasil : Cakupan layanan administrasi umum yang terpenuhi		N/A	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		
		2.07.01.2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	50 Paket	200,000,000	70 Paket	200,000,000	80 Paket	328,771,557	90 Paket	340,000,000
		2.07.01.2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (UPTD Balai Latihan Kerja)			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	5 Paket	80,000,000	120 Paket	80,000,000	140 Paket	100,000,000	160 Paket	110,000,000
		2.07.01.2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	6 Paket	50,000,000	10 Paket	60,000,000	15 Paket	70,000,000	20 Paket	80,000,000
		2.07.01.2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor (UPTD Balai Latihan Kerja)			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	4 Paket	10,000,000	10 Paket	10,000,000	15 Paket	10,000,000	20 Paket	40,000,000

		2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	2 Paket	195,000,000	2 Paket	193,778,549	2 Paket	195,000,000	2 Paket	223,514,794
		2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	100 Laporan	500,000,000	100 Laporan	500,000,000	100 Laporan	500,000,000	100 Laporan	530,000,000
		2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (UPTD Balai Latihan Kerja)			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	30 Paket	25,000,000	30 Paket	25,000,000	30 Paket	40,000,000	30 Paket	50,000,000
		2.07.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000
		2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Keluaran : Jumlah barang milik daerah yang diadakan dalam satu tahun		N/A	50 Unit		50 Unit		50 Unit		50 Unit	

					Hasil : Persentase barang milik daerah yang diadakan sesuai dengan rencana kebutuhan barang		N/A	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen	
		2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	50 Unit	500,000,000	50 Unit	500,000,000	50 Unit	500,000,000	500,000,000
		2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Balai Latihan Kerja)			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A				10 Unit	50,000,000	12 Unit	300,000,000
		2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Keluaran : Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah selama 12 bulan		N/A	1 Jenis	1 Jenis		1 Jenis		1 Jenis	

					Hasil : Cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah yang terpenuhi		N/A	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		
		2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	14 Laporan	600,000,000	14 Laporan	500,000,000	15 Laporan	500,000,000	18 Laporan	630,000,000
		2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (UPTD Balai Latihan Kerja)			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	26 Laporan	950,000,000	12 Laporan	950,000,000	15 Laporan	950,000,000	18 Laporan	950,000,000
		2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (UPTD Balai Latihan Kerja)			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	N/A	12 Laporan	180,000,000	12 Laporan	180,000,000	12 Laporan	180,000,000	12 Laporan	180,000,000
		2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Keluaran : Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dalam setahun		N/A	66 Unit	66 Unit		66 Unit		66 Unit		

					Hasil : Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik		N/A	100 Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		
		2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	N/A	20 Unit	150,000,000	30 Unit	150,000,000	40 Unit	150,000,000	50 Unit	180,000,000
		2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (UPTD Balai Latihan Kerja)			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	N/A	2 Unit	15,000,000	5 Unit	15,000,000	8 Unit	15,000,000	10 Unit	40,000,000
		2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	20 Unit	100,000,000	25 Unit	100,000,000	30 Unit	120,000,000	40 Unit	130,000,000
		2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (UPTD Balai Latihan Kerja)			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	5 Unit	26,350,000	10 Unit	26,350,000	15 Unit	26,350,000	20 Unit	50,000,000

		2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	N/A	46 Unit	200,000,000	100 Unit	200,000,000	150 Unit	200,000,000	200 Unit	230,000,000
		2.07.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (UPTD Balai Latihan Kerja)			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	N/A			8 Unit	50,000,000	10 Unit	60,000,000	12 Unit	100,000,000
Jumlah									30,838,384,000		30,727,010,549		33,153,313,557		34,823,706,794



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KETENAGAKERJAAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Renstra Dinas Ketenagakerjaan adalah perencanaan strategis SKPD yang merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan lainnya seperti Pola Dasar, Propeda dan RPJMP, yang dijabarkan lebih spesifik sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi.

Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan disusun berdasarkan alur pikir yang dimulai peraturan yang mengikat terkait penyusunan perencanaan rencana strategis dan berbagai masukan dari stakeholder. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bersama, maka dibuatlah arah kebijakan dan program-program kegiatan untuk mendukung Renstra Tahun 2023-2026.

Menganalisa Program dan Kegiatan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 maka terdapat isu-isu lingkungan strategis pembangunan ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas dan kualitas angkatan kerja melalui transformasi pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
2. Penyediaan layanan pasar kerja sebagai fasilitasi link and match antara penawaran dan permintaan tenaga kerja;
3. Perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda dan memberi akses menjadi tenaga kerja mandiri formal;
4. Pengembangan talenta muda di industri kreatif pada pekerjaan yang akan berkembang pada masa depan;
5. Perluasan pasar kerja formal luar negeri bagi pekerja migran Indonesia;
6. Pengembangan hubungan industrial yang adaptif terhadap perkembangan dunia kerja dan menjamin kesejahteraan pekerja yang berkesinambungan;
7. Peningkatan perlindungan tenaga kerja dan pemberi kerja melalui reformasi dan digitalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan;
8. Percepatan perubahan ekosistem digital layanan ketenagakerjaan;
9. Penata kelolaan pemerintahan, pengawasan internal dan percepatan reformasi birokrasi dengan mengarusutamakan integrasi teknologi digital ke dalam bisnis proses kementerian menuju digital era governance.

dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Melihat aturan tersebut perkembangan yang tersebut di atas, pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian menitikberatkan pada :

- a. Peningkatan daya saing tenaga kerja;
- b. Peningkatan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan jasa,
- c. Perluasan kesempatan kerja, peningkatan pelayanan kesempatan kerja dan pelayanan informasi bursa kerja;
- d. Peningkatan perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan serta bantuan hukum bagi tenaga kerja Jawa Barat;
- e. Peningkatan dan pengembangan kemampuan serta keterampilan wirausaha muda,
- f. Pendukung terhadap terwujudnya kerjasama antardaerah bidang ketransmigrasian melalui Forum KIE Transmigrasi; dan
- g. Peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat transmigrasi.

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, serta kondisi masa depan yang terus berubah dengan adanya era disrupsi dapat mendatangkan begitu banyak peluang sekaligus ancaman jika tidak mempersiapkannya. Era revolusi industri 4.0 yang saat ini sedang berlangsung dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi robot dan teknologi informasi, dan komunikasi dan ditunjang dengan perkembangan ekonomi digital yang digambarkan dengan semakin maraknya berkembang bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antar perusahaan ataupun antar individu menjadi tantangan besar bagi dunia ketenagakerjaan dan transmigrasi.

Tren Demografis:

1. Bonus Demografi
2. Hilangnya beberapa profesi di masa depan
3. Minta pada pelatihan vokasional;
4. Daya Tarik PNS Tinggi
5. Rendahnya Kesadaran Sertifikasi Kompetensi
6. Mismatch pendidikan dan Kebutuhan Industri
7. Tingginya angka pengangguran baik dari lulusan S1 maupun SMK

- 8. Upah Rendah
- 9. Tenaga kerja Tidak Kompeten
- 10. Minat Wirausaha Rendah
- 11. Rendahnya keinginan bekerja di luar negeri
- 12. Penggunaan Teknologi semakin Tinggi
- 13. Kurikulum SMA belum mengatur arah minat murid
- 14. Pertumbuhan Penduduk Tinggi
- 15. Kesempatan kerja Kompetitif dan Terbatas
- 16. Pendidikan sejak Usia Dini

Tabel 6 Tujuan dan Sasaran 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target kinerja Tujuan/sasaran pada tahun			
			2023	2024	2025	2026
Meningkatkan daya saing dan kesempatan kerja	Peningkatan Daya saing tenaga kerja dan iklim ketenagakerjaan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	66.00%	66.10%	66.20%	66.30%

Dari tabel diatas lalu dituangkan kedalam program Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi yang telah disusun untuk tahun 2023-2026 selama 4 tahun ke depan.

Tabel 7 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2023

No	Program	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 0 Tahun	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivit	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan	N/A	Persen	100	100	100	100	100

	as Tenaga Kerja	Persentase Pelatihan Angkatan Kerja Berbasis Kompetensi	N/A	Persen	10	20	30	40	40
		Persentase Perusahaan kecil yang ditingkatkan produktivitasnya	N/A	Persen	50	60	70	80	80
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar	N/A	Persen	40	40	40	40	40
		Persentase Tenaga Kerja yang Terserap melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	N/A	Persen	5	5	5	5	5
		Persentase Lowongan Kerja yang Terinformasikan	N/A	Lowongan	50	55	60	65	65
3	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Perjanjian Kerja Sama di Bidang Transmigrasi	N/A	Persen	100	100	100	100	100
4	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang memiliki Syarat Kerja	N/A	Persen	2	2	2	2	2
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	Point	55	57	59	61	61

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KETENAGAKERJAAN

Rencana program dan kegiatan disusun untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan. Untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan, terdiri dari program pilihan dan program wajib :

A. **Urusan Pemerintahan Pilihan**

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 84 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, maka urusan pilihan untuk yang akan dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi selama periode 2023-2026 dilakukan melalui **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi.**

B. **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi maka pelaksanaan program/kegiatannya urusan wajib diwadahi kedalam program program berikut ini:

- 1. **Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**
- 2. **Program Program Penempatan Tenaga Kerja**
- 3. **Program Hubungan Industrial**
- 4. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Berdasarkan kebutuhan anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi membutuhkan dana dari tahun 2023-2026 mencapai Rp. **129.542.414.900,-** (Seratus Dua Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

Tabel 8 Tabel Kebutuhan Anggaran 2023-2026

No.	Tahun	Pagu Anggaran (Rp)
1	2023	30.838.384.000,-
2	2024	30.727.010.549,-
3	2025	33.153.313.557,-
4	2026	34.823.706.794,-
Jumlah		129.542.414.900,-

Berdasarkan Tabel diatas bahwa Belanja Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024 sebanyak **Rp. 30.727.010.549,-** terdiri belanja Operasi dan belanja Modal.



Tabel 9 Rencana Kerja Perubahan 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Target		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								29,628,362,000	29,413,316,000			26,996,232,500	
2	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								18,656,614,500	18,558,887,500			17,910,344,000	
2	0	0	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								449,152,000	449,152,000			384,152,000	

2	0	0	2.0	0	Penyusunan Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah ditambah Keselarasan Renjadengan Renstra ditambah Keselarasan DPA dengan Renja dibagi 3	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	Point 55	Point 55	2 Dokumen	2 Dokumen	100 Persen	100 Persen	20,000,000	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Point 55	120,000,000
2	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Keselarasan Renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah ditambah Keselarasan Renjadengan Renstra ditambah Keselarasan DPA dengan Renja dibagi 3	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	Point 55	Point 55	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	13,721,000	13,721,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Point 55	13,006,000

2	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Keselarasan Renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah ditambah Keselarasan Renjadengan Renstra ditambah Keselarasan DPA dengan Renja dibagi 3	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	Point 55	Point 55	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	10,067,000	10,067,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Point 55	9,334,000
---	---	---	-----	---	--	---	--	--	---------------------------------------	----------	----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------------------------	--	---	----------	-----------

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target			
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah			
2	0	7	0	1	2.0	0	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase Keselarasan Renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah ditambah Keselarasan Renjadengan Renstra ditambah Keselarasan DPA dengan Renja dibagi 3	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	Point 55	Point 55	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	13,722,600	13,722,600	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Point 55	13,006,000

2	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase Keselarasan Renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah ditambah Keselarasan Renjadengan Renstra ditambah Keselarasan DPA dengan Renja dibagi 3	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	Point 55	Point 55	1 Dokumen	1 Dokumen	100 Persen	100 Persen	9,521,000	9,521,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Point 55	8,806,000
2	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Keselarasan Renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah ditambah Keselarasan Renjadengan Renstra ditambah Keselarasan DPA dengan Renja dibagi 3	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	Point 55	Point 55	5 Laporan	5 Laporan	100 Persen	100 Persen	131,850,000	131,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Point 55	150,000,000

2	0	0	2.0	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Renstra dengan Rencana Pembangunan Daerah ditambah Keselarasan Renjadengan Renstra ditambah Keselarasan DPA dengan Renja dibagi 3	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	Point 55	Point 55	8 Laporan	8 Laporan	100 Persen	100 Persen	250,270,400	250,270,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Point 55	70,000,000
2	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										15,031,192,000	14,933,465,000	14,931,192,000				

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutu han Dana/ Pagu Indikati f(Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	
2	0	0	2.0	0	1	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Orang yang MenerimaGaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan perangkat daerah	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	55 Point	55 Point	57 Orang/b ulan	60 Orang/b ulan	100 Persen	100 Persen	14,831,192,000	14,733,465,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Indek s Refor masi Birokr asi peran gkat daera h	55 Point	14,731,1 92,000
2	0	0	2.0	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan perangkat daerah	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	55 Point	55 Point	2 Laporan	2 Laporan	100 Persen	100 Persen	50,000,000	50,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Indek s Refor masi Birokr asi peran gkat daera h	55 Point	100,000, 000

2	0	0	2.0	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase terpenuhinya ketersediaan laporan keuangan perangkat daerah	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	55 Point	55 Point	3 Laporan	3 Laporan	100 Persen	100 Persen	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	55 Point	100,000,000
2	0	0	2.0	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah											1,905,755,900	1,905,755,900	1,045,000,000				
2	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Cakupan layanan administrasi umum yang terpenuhi	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	55 Point	55 Point	5 Paket	5 Paket	1 Layanan	1 Layanan	194,985,800	194,985,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	55 Point	200,000,000
2	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan layanan administrasi umum yang terpenuhi	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	55 Point	55 Point	4 Paket	4 Paket	1 Layanan	1 Layanan	275,700,000	275,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Reformasi Birokrasi peran	55 Point	50,000,000

																			gkat daera h			
2	0	0	2.0	0	Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaanyang Disediakan	Cakupan layanan administrasi umum yang terpenuhi	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	55 Point	55 Point	1 Paket	1 Paket	1 Layanan	1 Layanan	72,876,000	72,876,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Indek s Refor masi Birokr asi peran gkat daera h	55 Point	195,000, 000
2	0	0	2.0	0	Penyelenggara anRapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi umum yang terpenuhi	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	55 Point	55 Point	100 Laporan	100 Lapora n	1 Layanan	1 Layanan	1,189,000,000	1,189,000,000	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Indek s Refor masi Birokr asi peran gkat daera h	55 Point	500,000, 000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Progra m		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2070160	Penatausahaan Arsip Dinamis padaSKPD	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cakupan layanan administrasi umum yang terpenuhi	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	55 Point	55 Point	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Layanan	1 Layanan	173,194,100	173,194, 100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indek s Refor masi Birokr asi peran gkat daera h	55 Point	100,000,000				
207017	017	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									166,412,000	166,412 ,000	500,000,000								
20701706	Pengadaa n Peralatan danMesin Lainnya	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase barangmilik daerah yang diadakan sesuai dengan rencana kebutuhan barang	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	55 Point	55 Point	38 Unit	38 Unit	100 persen	100 persen	166,412,000	166,412, 000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indek s Refor masi Birokr asi peran gkat daera	55 Point	500,000,000				

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

2	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase barangmilik daerah dalam kondisi baik	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	55 Point	55 Point	20 Unit	20 Unit	100 Persen	100 Persen	243,000,000	243,000, 000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indek s Refor masi Birokr asi peran gkat daera h	55 Point	150,000,000
2	0	0	2.0	0	Pemeliha aan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barangmilik daerah dalam kondisi baik	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	55 Point	55 Point	70 Unit	70 Unit	100 Persen	100 Persen	65,000,000	65,000,0 00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indek s Refor masi Birokr asi peran gkat daera h	55 Point	100,000,000
2	0	0	2.0	1	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Persentase barangmilik daerah dalam kondisi baik	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	55 Point	55 Point	1 Unit	1 Unit	100 Persen	100 Persen	200,000,000	200,000, 000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indek s Refor masi Birokr asi peran gkat	55 Point	200,000,000

																		daerah		
2073	0		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA											4,285,888,500	4,535,888,500				4,285,888,500	
2073	0	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi											2,235,888,500	2,485,888,500				2,235,888,500	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluara Sub Kegiat an	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
207	03	2.01	01		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi padaTahun n	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Sertifikasi Kompetensi dan Pelatihan	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	528 Orang	528 Oran g	100 persen	100 persen	2,235,888,500	2,485,888,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Persentase Pencari Kerja yang mendap atkan Pelatiha n	100 Persen	2,235,888,500
207	03	2.02	01		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta										750,000,000	750,000,000	750,000,000					
207	03	2.02	01		Pembinaan Lembaga PelatihanKerja Swasta	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Persentase LPK Terakreditas i	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	100 Persen	100 Persen	160 Lembaga	160 Lemb aga	1 persen	1 persen	750,000,000	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)		Persentase Pencari Kerja yang mendap atkan Pelatiha n	100 Persen	750,000,000
207	03	2.0			Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil										700,000,000	700,000,000	700,000,000					

	7	3	4												00							
2	0	0	2.0	0	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan kecil yang ditingkatkan produktivitasnya	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Persentase Perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi produktivitas	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	50 Persen	50 Persen	110 Perusahaan	320 Perusahaan	10 persen	10 persen	700,000,000	700,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)		Persentase Perusahaan kecil yang ditingkatkan produktivitasnya	50 Persen	700,000,000
2	0	0	2.0		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										600,000,000	600,000,000					600,000,000	
2	0	0	2.0	0	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan kecil yang ditingkatkan produktivitasnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Persentase hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja	Kab. Bekasi, Tambun Utara, Srimahi	50 Persen	50 Persen	1 Dokumen	157 Dokumen	5 persen	5 persen	600,000,000	600,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)		Persentase Perusahaan kecil yang ditingkatkan produktivitasnya	50 Persen	600,000,000
2	0	0			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA										3,070,000,000	3,017,500,000					2,420,000,000	
2	0	0	2.0		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota										795,000,000	795,000,000					595,000,000	

2	0	0	2.0	0		Pelayanan antarKerja	Persentase penempatan pencari kerja terdaftar Persentase Tenaga Kerja yang terserap melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelayanan Antar Kerja	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	40 Persen 5 Persen	40 Persen 5 Persen	15000 Orang	15000 Orang	60 persen	60 persen	625,000,000	625,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)	Persentase penempatan pencari kerja terdaftar Persentase Tenaga Kerja yang terserap melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Persen 5 Persen	425,000,000
---	---	---	-----	---	--	----------------------	---	---	---	---------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-------------	-------------	-----------------------------	---	-----------------------	-------------

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
200704	2.01	04				Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Persentase penempatan pencari kerja terdaftar Persentase Tenaga Kerja yang terserap melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelayanan Antar Kerja	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	40 Persen 5 Persen	40 Persen 5 Persen	30 Orang	30 Orang	60 persen	60 persen	60,000,000	60,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penempatan pencari kerja terdaftar Persentase Tenaga Kerja yang terserap melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Persen 5 Persen	60,000,000

2020	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase penempatan pencari kerja terdaftar Persentase Tenaga Kerja yang terserap melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelayanan Antar Kerja	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	40 Persen 5 Persen	40 Persen 5 Persen	60 Orang	60 Orang	60 persen	60 persen	110,000,000	110,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penempatan pencari kerja terdaftar Persentase Tenaga Kerja yang terserap melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Persen 5 Persen	110,000,000
2020	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja											900,000,000	900,000,000				700,000,000	
2020	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Persentase lowongan kerja yang terinformasikan	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data IPK yang terpublish	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	50 Lowongan	50 Lowongan	1 Dokumen	1 Dokumen	50 Lowongan	50 Lowongan	400,000,000	400,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase lowongan kerja yang terinformasikan	50 Lowongan	400,000,000
2020	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Persentase lowongan kerja yang terinformasikan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerjayang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Jumlah Data IPK yang terpublish	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	50 Lowongan	50 Lowongan	195 Orang	195 Orang	50 Lowongan	50 Lowongan	500,000,000	500,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase lowongan kerja yang terinformasikan	50 Lowongan	300,000,000
2020	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota											625,000,000	572,500,000				625,000,000	

2020	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi CalonPekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Presentase penempatan pencari kerja terdaftar	Jumlah CPMI/PMIyang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	40 Persen	40 Persen	410 Orang	410 Orang	460 Orang	460 Orang	425,000,000	425,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase penempata npencari kerja terdaftar	40 Persen	425,000,000
2020	07	04	2.04	03	Pemberdayaa n Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Presentase penempatan pencari kerja terdaftar	Jumlah PMI Purnayang Diberdayakan	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	40 Persen	40 Persen	50 Orang	50 Orang	460 Orang	460 Orang	200,000,000	147,500,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase penempata npencari kerja terdaftar	40 Persen	200,000,000
2020	07	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota											750,000,000	750,000,000				500,000,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2020	07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Presentase penempatan pencari kerja terdaftar	Jumlah Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Asing yang di Koordinasikan	Persentase Peningkatan Realisasi Retribusi Pengguna Tenaga Kerja Asing/IMTA	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	40 Persen	40 Persen	500 Perusahaan	500 Perusahaan	75 persen	75 persen	750,000,000	750,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Presentase penempatan pencari kerja terdaftar	40 Persen	500,000,000
2020	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL										3,615,859,000	3,301,040,000				2,380,000,000		
2020	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota										20,540,800	20,540,800				100,000,000		

2020	0751	2.00	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Persentase Perusahaan yang memiliki syarat kerja	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKPOOnline	PPersentase Penyelesaian Pelayanan Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB tepat waktu	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	2 Persen	2 Persen	200 Perusahaan	200 Perusahaan	40 persen	40 persen	10,270,400	10,270,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perusahaan yang memiliki syarat kerja	2 Persen	50,000,000
2020	0751	2.00	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Persentase Perusahaan yang memiliki syarat kerja	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	PPersentase Penyelesaian Pelayanan Pengesahan PP dan Pendaftaran PKB tepat waktu	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	2 Persen	2 Persen	300 Perusahaan	300 Perusahaan	40 persen	40 persen	10,270,400	10,270,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perusahaan yang memiliki syarat kerja	2 Persen	50,000,000
2020	0752	2.00	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota											3,595,318,200	3,280,499,200				2,280,000,000

2	0	0	2.0	0	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang memiliki syarat kerja	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Persentase Penyelesaian Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	2 Persen	2 Persen	385 Perkara	385 Perkara	50 persen	50 persen	774,983,000	774,983,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perusahaan yang memiliki syarat kerja	2 Persen	300,000,000
2	0	0	2.0	0	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang memiliki syarat kerja	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Persentase Penyelesaian Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	2 Persen	2 Persen	200 Perkara	200 Perkara	50 persen	50 persen	1,200,673,600	885,854,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perusahaan yang memiliki syarat kerja	2 Persen	300,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan n	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolak Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase Perusahaan yang memiliki syarat kerja	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Persentase Penyelesaian Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	2 Persen	2 Persen	3 Asosiasi	3 Asosiasi	50 persen	50 persen	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perusahaan yang memiliki syarat kerja	2 Persen	150,000,000

2	7	0	5	2.0	0	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yangmemiliki syarat kerja	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Persentase Penyelesaia n Pencegaha n perselisihan Hubungan Industrial	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	2 Persen	2 Persen	3 Lembaga	3 Lembaga	50 persen	50 persen	1,469,661,600	1,469,661,600	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)		Persentas e Perusaha an yang memliiki syarat kerja	2 Persen	1,530,000,000		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																					
3	3	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI														725,000,000	725,000,000				660,000,000		
3	3	2	0	3		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI														725,000,000	725,000,000				660,000,000	
3	3	2	0	3	2.0	1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														725,000,000	725,000,000				660,000,000

3	3	0	2.0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perjanjian Kerjasama di bidang transmigrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang mengikuti perpindahan penduduk	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	5 Keluarga	5 Keluarga	425,000,000	425,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perjanjian Kerja sama di bidang transmigrasi	100 Persen	375,000,000
3	3	0	2.0	0	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perjanjian Kerjasama di bidang transmigrasi	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti perpindahan penduduk	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	5 Kepala Keluarga	5 Kepala Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	100,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perjanjian Kerja sama di bidang transmigrasi	100 Persen	85,000,000
3	3	0	2.0	0	Penyuluhan Transmigrasi	Persentase Perjanjian Kerjasama di bidang transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti perpindahan penduduk	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	350 Kepala Keluarga	350 Kepala Keluarga	5 Keluarga	5 Keluarga	150,000,000	150,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Perjanjian Kerja sama di bidang	100 Persen	150,000,000

																			transmigrasi		
3	3	0	2.0	0	Pelatihan Transmigrasi	Persentase Perjanjian Kerjasama di bidang transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Jumlah Masyarakat yang mengikuti perpindahan penduduk	Kab. Bekasi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	10 Orang	10 Orang	5 Keluarga	5 Keluarga	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Perjanjian Kerja sama di bidang transmigrasi	100 Persen	50,000,000
TOTAL																30,353,362,000	30,138,316,000				27,656,232,500

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiata n	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur			Targe t				
						Sebelum	Sesuda h	Sebel um	Sesuda h	Sebelu m	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	0 7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												5,167,586,400	5,167,586,400			4,469,064,400		
2	0 7	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												1,802,128,702	1,802,128,702			1,286,350,000		
2	0 7	0 1	2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah												403,068,702	403,068,702			115,000,000		
2	0 7	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	Cakupan layanan administrasi umum yang terpenuhi	Kab. Bekasi, Tambun Utara, Srimahi	55 Point	55 Point	7 Paket	7 Paket	100 persen	100 persen	368,068,702	368,068,702	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	55 Point	80,000,000
2	0 7	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan layanan administrasi umum yang terpenuhi	Kab. Bekasi, Tambun Utara, Srimahi	55 Point	55 Point	2 Paket	2 Paket	100 persen	100 persen	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	55 Point	10,000,000

2020	0716	0209	Penyelenggara anRapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Cakupan layanan administrasi umum yang terpenuhi	Kab. Bekasi, Tambun Utara, Srimahi	55 Point	55 Point	23 Laporan	23 Laporan	100 persen	100 persen	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	55 Point	25,000,000
2020	0718	0208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											1,359,120,000	1,359,120,000					1,130,000,000
2020	0718	0202	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik yang Disediakan	Cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerahyang terpenuhi	Kab. Bekasi, Cikarang Pusat, Sukamahi	55 Point	55 Point	12 Laporan	12 Laporan	100 persen	100 persen	113,680,000	113,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	55 Point	180,000,000
2020	0718	0204	Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan UmumKantor yang Disediakan	Cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerahyang terpenuhi	Kab. Bekasi, Tambun Utara, Srimahi	55 Point	55 Point	26 Laporan	26 Laporan	100 persen	100 persen	1,245,440,000	1,245,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	55 Point	950,000,000
2020	0719	0209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											39,940,000	39,940,000					41,350,000

2	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase barangmilik daerah dalam kondisi baik	Kab. Bekasi, Tambun Utara, Srimahi	55 Point	55 Point	1 Unit	1 Unit	100 persen	100 persen	16,200,000	16,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	55 Point	15,000,000
2	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Jumlah Peralatandan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase barangmilik daerah dalam kondisi baik	Kab. Bekasi, Tambun Utara, Srimahi	55 Point	55 Point	36 Unit	36 Unit	100 persen	100 persen	23,740,000	23,740,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Indeks Reformasi Birokrasi perangkat daerah	55 Point	26,350,000
2	0	0			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA										3,365,457,698	3,365,457,698				3,182,714,400		
2	0	0	2.0		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi										3,365,457,698	3,365,457,698				3,182,714,400		
	7	1	9	1																		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase pelatihan angkatan kerjaberbasis kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan	Kab. Bekasi, Tambun Utara, Srimahi	10 Persen	10 Persen	475 Orang	475 Orang	100 persen	100 persen	2,937,024,400	2,937,024,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Persentase pelatihan angkatan kerja berbasis kompetensi	10 Persen	2,937,024,400
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Persentase pelatihan angkatan kerjaberbasis kompetensi	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana PelatihanKerja	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan	Kab. Bekasi, Tambun Utara, Srimahi	10 Persen	10 Persen	16 Unit	16 Unit	100 persen	100 persen	428,433,298	428,433,298	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelatihan angkatan kerja berbasis kompetensi	10 Persen	245,690,000
TOTAL																5,167,586,400	5,167,586,400				4,469,064,400	

REKAP ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2023

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaSatuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	32.000.000.000	32.000.000.000	0
4	1	02	Retribusi Daerah	32.000.000.000	32.000.000.000	0
			Jumlah Pendapatan	32.000.000.000	32.000.000.000	0
5			BELANJA			
5	1		BELANJA OPERASI	34.716.251.400	34.431.955.400	(284.296.000)
5	1	01	Belanja Pegawai	14.831.192.000	14.733.465.000	(97.727.000)
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	19.885.059.400	19.698.490.400	(186.569.000)
5	2		BELANJA MODAL	804.697.000	873.947.000	69.250.000
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	604.697.000	673.947.000	69.250.000
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000	200.000.000	0
			Jumlah Belanja	35.520.948.400	35.305.902.400	(215.046.000)
			Total Surplus/(Defisit)	(3.520.948.400)	(3.305.902.400)	215.046.000
6			PEMBIAYAAN			
			Jumlah Penerimaan Pembiayaan			0
			Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			0
			Pembiayaan Netto			0

BAB V

PENUTUP

Renja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi pada Tahun 2023 khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya, serta didasrkan pada lintas program dan usulan masyarakat melalui mekanisme yang partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan Pembangunan Kabupaten Bekasi yang menjadi tanggung jawab Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi. Sebagai dokumen rencana resmi daerah, diharapkan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Tahun 2023 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/kegiatan dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik dimasa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan mendasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembanguann Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing seksi. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program kegiatan dapat terlihat, sedangkan tingkat capaian kinerjanya dapat tercermin dalam format pengendalian tersebut.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Apabila dikemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan ataupun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian scenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Semoga Renja Perubahan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder terkait, sehingga diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan yang berarti dalam menyusun program dan kegiatan prioritas di tahun yang akan datang. Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja ini

Bekasi,

2023

**KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
KABUPATEN BEKASI**

Drs. H. EDI ROCHYADI, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 196409061986031012